

KETAHANAN PANGAN SUKU ANAK DALAM (SAD) DI PROPINSI JAMBI Artikel Review

Isyaturriyadhah

Mahasiswa Program Studi S3 Ilmu Pertanian
Fakultas Pertanian Universitas Andalas

isyaturriyadhah_amin@yahoo.com

ABSTRAK

Tulisan yang disusun dari berbagai literatur/jurnal ini bertujuan pertama, mengetahui ketersediaan pangan Suku Anak Dalam (SAD) di Propinsi Jambi. Kedua, mengetahui akses SAD dalam rangka pemenuhan pangan untuk pencapaian ketahanan pangan SAD di Propinsi Jambi. Ketiga, mengetahui kebijakan untuk meningkatkan aksesibilitas SAD terhadap pangan dalam rangka meningkatkan akses SAD terhadap pangan di Propinsi Jambi. Metode yang dilakukan pada penelitian ketahanan pangan sebelumnya adalah metode kualitatif dan kuantitatif melalui teknik wawancara pada sejumlah responden di lokasi penelitian. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya diketahui bahwa kondisi rawan pangan masih banyak ditemui di berbagai wilayah dan belum pernah dilakukan penelitian tentang ketersediaan pangan dan akses pangan pada Suku Anak Dalam yang ada di Propinsi Jambi.

Kata Kunci : Suku Anak Dalam (SAD), Ketahanan Pangan dan Akses Pangan.

FOOD SECURITY OF SUKU ANAK DALAM (SAD) IN JAMBI PROVINCE

ABSTRACT

Writing compiled from various literatures / journals the first aims to know the food availability of Suku Anak Dalam (SAD) in Jambi Province. Second, to know the access of SAD in order to fulfilling food for the achievement of SAD food security in Jambi Province. Third, to know the policy to increase SAD accessibility to food in order to increase SAD access to food in Jambi Province. The method used in the previous food security study was qualitative and quantitative methods through interview techniques to a number of respondents at the study site. Based on previous studies, it is known that the condition of food insecurity is still widely found in various regions and there has never been a study of food availability and food access of SAD in Jambi Province.

Keywords: Suku Anak Dalam (SAD), Food Security and Food Access.

Pendahuluan

Keamanan pangan, rasa tidak aman dan kelaparan adalah topik yang sangat penting di seluruh dunia. Baru-baru ini fokus studi ketahanan pangan telah

berpindah dari global ke lokal bergeser menjadi masalah yang dihadapi individu dan rumah tangga seperti mata pencaharian, keadilan pangan dan kesehatan serta kesejahteraan. Ketahanan pangan telah

menjadi isu sentral dalam kerangka pembangunan pertanian dan pembangunan nasional, hal ini ditunjukkan antara lain dengan dijadikannya isu ketahanan pangan sebagai fokus pembangunan yang terdapat dalam salah satu program nawacita yaitu masyarakat Indonesia bebas dari kemiskinan dan kelaparan. Ketahanan pangan tidak hanya bergantung kepada ketersediaan pangan, tetapi juga akses dan penyerapan pangan.

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem ekonomi pangan yang terintegrasi dan terdiri atas berbagai subsistem. Subsistem utamanya adalah ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi pangan. Terwujudnya ketahanan pangan merupakan sinergi dan interaksi dari ketiga subsistem tersebut. Peningkatan ketahanan pangan merupakan prioritas utama dalam pembangunan karena pangan merupakan kebutuhan yang paling dasar bagi manusia sehingga pangan sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional (Doremus, 2019).

Di Sumatera terdapat sejumlah suku-suku besar yang mempunyai ciri khas tradisional. Selain itu terdapat pula beberapa suku minoritas yang mendiami beberapa daerah, terutama di daerah hutan luas di antara sungai-sungai besar di sekitar rawa-rawa. Salah satu suku minoritas tersebut adalah suku anak dalam (SAD) (Takiddin, 2014). Suku Anak Dalam (SAD)

memiliki gaya hidup dan kepercayaan yang unik dan berbeda dari kehidupan masyarakat modern. Mereka memandang hutan sebagai tempat tinggal mereka. Mereka adalah bagian penting dari hutan itu sendiri. Mereka sangat menggantungkan hidupnya pada hutan. Oleh karena itu, mereka sangat menjaga kelestarian hutan. Mereka mempunyai persepsi bahwa hutan adalah milik bersama, sehingga siapapun boleh memanfaatkannya. SAD tidak ingin hutan musnah karena hutan itu sendiri adalah rumah mereka. Sementara itu karena faktor ekonomi dan desakan kebutuhan akan ladang dan kayu, tidak sedikit kalangan yang terus-menerus merusak hutan dengan cara menebang pohon dan membuka ladang. Kondisi tersebut tentu berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan SAD. Atas kondisi yang terjadi maka perlu dikaji tentang ketahanan pangan SAD yang ada di Propinsi Jambi.

Metodologi Penelitian

Penelitian-penelitian sebelumnya membahas tentang pentingnya aksesibilitas rumah tangga terhadap pangan sebagai faktor kunci untuk mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia. Analisis didasarkan pada telaah studi pustaka dengan menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber informasi. Pada penelitian sebelumnya dilakukan survey awal dan dilanjutkan dengan metode

wawancara terbuka untuk mengumpulkan data dalam menjawab masalah penelitian (Utter, Denny, Farrant, & Cribb, 2019);(Tikkanen, 2018).

Pada penelitian terdahulu juga diantaranya adalah membahas sumber data yang mencakup informasi tentang distribusi pendapatan berdasarkan wilayah berdasarkan ras atau etnis. (Berman, 2018); (Merino, 2018). Studi ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk memeriksa kerentanan pangan dan kapasitas masyarakat adat. Pengumpulan data untuk penelitian ini dikombinasikan survei, wawancara, diskusi kelompok terfokus (FGD) dan observasi (Ngoc, Thi, Chi, & Kingsbury, 2019); (Zavaleta et al., 2017). Untuk mengukur dimensi ketahanan pangan, pertama-tama ditentukan apakah sesuai untuk mengukur ketahanan pangan individu, rumah tangga atau masyarakat. Di masyarakat Barat biasanya dilakukan di tingkat individu. (Lysenko & Schott, 2019); (Bose, 2019); (Schwartz, Tarasuk, Buliung, & Wilson, 2019). Informasi kualitatif dan kuantitatif dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner semi struktur (David, Nuringdati, & Ploeger, 2016); (Yamada, 2018).

Penelitian lain dilakukan pada wilayah yang paling rawan pangan dan merupakan daerah yang rawan kekeringan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian

metode campuran (Teferi Moroda, Tolossa, & Semie, 2018); (Goodrich, Prakash, & Udas, 2019). Selanjutnya dilakukan wawancara pada rumah tangga rawan pangan (Pudyatmoko, Budiman, & Kristiansen, 2018), (Brusselaers & Buyse, 2018)

Hasil dan Pembahasan

Kerawanan pangan dan gizi serta penyakit, dapat ditemukan di setiap sudut dunia didorong oleh urbanisasi dan gaya hidup menetap. Situasi ini sangat penting bagi masyarakat adat, yang mengalami kemiskinan keuangan dan kesenjangan kesehatan yang paling parah di negara-negara berkembang dan maju terutama dimana mereka bergantung pada ekosistem untuk mendukung kebutuhan mereka akan makanan dan kesejahteraan (King, 2015).

Masalah ketahanan pangan telah muncul sebagai perhatian utama yang diperburuk oleh kerentanan terhadap perubahan iklim dan bencana alam (Shah, Moroca, & Bhat, 2018). Dalam perspektif sistem ekonomi pangan, ketahanan pangan memiliki tiga pilar utama yaitu subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi. Pentingnya aksesibilitas rumah tangga terhadap pangan dalam pencapaian ketahanan pangan di Indonesia didasarkan pada pertimbangan berikut : (1) Ketahanan dan ketersediaan pangan di tingkat nasional, regional/wilayah merupakan

syarat keharusan tetapi itu saja tidak cukup, (2) Terjaminnya ketahanan pangan tingkat rumah tangga merupakan syarat kecukupan bagi tercapainya ketahanan pangan lokal, regional, nasional dan global, (3). Bukti empiris menunjukkan bahwa di wilayah tahan pangan dan terjamin masih ditemukan proporsi rumah tangga rawan pangan yang cukup tinggi dan (4) Kasus rawan pangan dan insiden busung lapar di berbagai daerah pada kondisi ketersediaan pangan nasional (dan wilayah) cukup. Kebijakan untuk meningkatkan aksesibilitas rumah tangga terhadap pangan bertujuan untuk : (1) meningkatkan akses rumah tangga terhadap pangan dalam jumlah, kualitas, merata dan terjangkau, dan (2) meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga melalui keanekaragaman konsumsi pangan yang bergizi dan berimbang. Implementasi dari ketiga komponen pokok tersebut adalah dengan memanfaatkan sebesar-besarnya potensi sumber daya alam/lokal yang beragam yang dimiliki untuk meningkatkan dan memantapkan ketersediaan bahan pangan sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat; mengembangkan kemitraan dalam pemasaran produksi pangan baik lokal maupun antar daerah sehingga menjamin pemerataan pasokan serta mengupayakan jaminan bagi masyarakat miskin perkotaan

dan pedesaan untuk mampu mengakses pangan yang bersifat pokok.

Dalam Komite PBB juga dibahas tentang Keamanan Pangan Dunia sebagai dasar penentuan kebijakan untuk menuju gerakan kedaulatan pangan global (Claeys & Duncan, 2019). Beberapa studi meneliti penyebab kerentanan dan serangkaian strategi respons yang dilakukan, hanya sedikit yang membedakan intervensi pembangunan dari aksi adaptasi iklim (Singh et al., 2019). Dalam penelitian lain (Loring & Whitely, 2018) melakukan studi yang meneliti apakah hibah sosial dan konsumsi makanan liar mengurangi kerawanan pangan di Afrika Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas yang terbatas akan berakibat pada kesulitan untuk mencukupi pangan yang bermutu dan bergizi, sehingga akan menghambat kesinambungan ketahanan pangan. Pemenuhan kebutuhan pangan juga harus menekankan status gizi yang baik. Selain itu, ketahanan pangan lokal juga harus dikembangkan dan diselaraskan dengan perkembangan modernisasi agar lebih mudah dalam pencapaiannya.

Akses pangan didefinisikan sebagai kemampuan rumah tangga untuk secara periodik memenuhi sejumlah pangan yang cukup melalui kombinasi cadangan pangan mereka sendiri dan hasil dari rumah/pekarangan sendiri, pembelian, barter, pemberian, pinjaman dan bantuan

pangan. Permasalahan akses pangan terutama yang berakibat pada keadaan yang bersifat kronis merupakan hal penting yang memerlukan perhatian. Lebih lanjut (Loring & Whitely, 2018) mengatakan bahwa akses pangan ialah kemampuan suatu rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup secara terus-menerus melalui berbagai cara, seperti produksi pangan rumah tangga, persediaan pangan rumah tangga, jual-beli, tukar menukar/barter, pinjam-meminjam dan pemberian atau bantuan pangan. Akses pangan merupakan salah satu dimensi dari 3 dimensi ketahanan pangan, selain ketersediaan pangan dan penyerapan pangan, selanjutnya dapat dikategorikan menjadi akses fisik, akses ekonomi dan sosial. Suatu sistem pangan mencakup semua praktik, alat dan praktik sosial, budaya, politik dan teknologi yang terlibat dalam produksi, distribusi dan konsumsi makanan. Sistem pangan dapat menjadi kompleks dan rumit dan dapat ditingkatkan secara lokal dan global.

Kondisi kepemilikan tanah adat sebagai aset utama yang dimiliki masyarakat adat dan di banyak negara mereka mengalami tingkat ketidak amanan kepemilikan lahan yang tinggi. Hak atas tanah adat cenderung dalam bentuk sumber daya milik bersama (Cordoba, 2019) kondisi yang terjadi pada SAD saat ini tidak lagi seperti ini, mereka sudah

direlokasi sebagai bagian dari program pemerintah. Hasil penelitian (Kumar et al., 2020) menyatakan bahwa masyarakat adat tetap bertahan dalam mempraktekkan cara hidup berladang mereka karena itu adalah bagian dari budaya dan tradisi mereka. Bagian tak terpisahkan dari devolusi ketahanan pangan dari tingkat global ke tingkat lokal juga telah menjadi penerapan sistem untuk ketahanan pangan (Otoara, Gonzalez, & Wairiu, 2019).

Dalam penelitian lain ditemukan bahwa rumah tangga kelahiran Meksiko di AS secara tidak proporsional mengalami kerawanan pangan, suatu kondisi yang terkait dengan kesehatan yang buruk. Strategi program bantuan penyediaan makanan mungkin tidak dapat diakses oleh imigran dan berpengaruh pada tingkat ketahanan pangan mereka (C. McClain, L. Dickin, & Dollahite, 2019) Terkait hal tersebut akhirnya kebijakan-kebijakan yang dibuat dan proses birokrasi harus disederhanakan untuk memungkinkan manajemen yang efektif sehingga masyarakat adat dapat menekan angka kerawanan pangan (Doan-crider, Hipp, Fight, & Small, 2013); (Nogueira, 2019).

Selain itu untuk mencegah kerawanan pangan sangat penting untuk memahami faktor-faktor penyebab atau akar penyebab kerentanan, khususnya di dunia dengan risiko yang semakin meningkat. Kerangka kerja yang dikembangkan di sini

menganggap sistem pangan sebagai sistem sosioekologis misalnya penyediaan dan penggunaan ekosistem dan lembaga sosial idealnya harus menyediakan ketahanan pangan bersama dengan bentuk kesejahteraan sosial dan budaya lainnya. Kerentanan bencana juga dianggap sebagai ketahanan mata pencaharian (seperti pengetahuan, kekuasaan dan partisipasi, kemampuan, aset dan modal sosial) dan kapasitas daya serap, adaptif dan transformasional (Jackson, Mcnamara, & Witt, 2019); mengakui hak-hak masyarakat adat juga secara langsung akan berpengaruh terhadap ketahanan pangan mereka (Graziano, Gunter, & Pazienza, 2019). Risiko penyakit kronis masyarakat adat cenderung meningkat sebagai akibat dari kebijakan pemerintah yang melanggar mata pencaharian dan wilayah masyarakat adat, merusak sistem ekonomi, nilai-nilai dan jaringan solidaritas mereka. Kebijakan pangan yang mempertimbangkan hak asasi masyarakat adat, termasuk hak mereka untuk menikmati budaya mereka, dapat mengimbangi pertumbuhan penyakit kronis di komunitas-komunitas adat (Damman, Barth, & Kuhnlein, 2008)

Kondisi kerawanan pangan juga terjadi pada penduduk yang bermigrasi. Migrasi memberikan mata pencaharian alternatif tetapi juga berdampak pada kesehatan karena kondisi kehidupan yang buruk yang dialami selama migrasi ke

kota-kota besar atau lokasi kota lainnya di negara ini (Ahmed et al., 2019). Kelaparan dan kekurangan gizi yang terus-menerus dan meluas tetap menjadi tantangan besar di banyak bagian dunia. Tingkat kemajuan saat ini tidak akan cukup untuk memberantas kelaparan pada tahun 2030 dan bahkan pada tahun 2050. Ke depan, pertanyaan intinya adalah apakah sistem pertanian dan pangan saat ini mampu memenuhi kebutuhan populasi global yang diproyeksikan untuk mencapai lebih banyak dari 9 miliar pada pertengahan abad dan mungkin memuncak di lebih dari 11 miliar pada akhir abad ini (Jordan, 2019). Ada penelitian terbatas, tentang bagaimana pangan nasional dan dukungan program sosial dirasakan, diterima, dan digunakan di kalangan masyarakat adat. Dari hasil penelitian (Bonis-profumo, McLaren, & Fanzo, 2019) mengatakan bahwa Timor Leste memiliki peluang besar untuk memastikan keamanan pangan dan gizi bagi warga negaranya. Dalam penelitian lain (Zavaleta et al., 2017) menyebutkan bahwa kerawanan pangan merupakan tantangan utama yang dihadapi komunitas Adat Shawi di Peru, yang menerima dukungan pangan melalui program tingkat nasional.

Komunitas Adat Terpencil yaitu SAD yang ada di Propinsi Jambi menjadi perhatian pemerintah hingga saat ini dan telah dilakukan pemberdayaan terhadap

Suku Anak Dalam tersebut. Sampai sejauh ini telah banyak dilakukan penelitian terhadap Suku Anak Dalam akan tetapi hanya ditemukan 1 artikel yang meneliti tentang ketahanan Pangan Suku Anak Dalam di Propinsi Jambi. Penelitian tersebut membandingkan ketahanan pangan SAD dengan suku Ifugao di Propinsi Ifugao Filipina dengan focus penelitiannya yaitu melihat tantangan yang dihadapi komunitas tersebut dalam memenuhi ketahanan pangan mereka (Wardani, 2011). Ketersediaan pangan SAD, akses SAD dalam rangka pemenuhan pangan dan kebijakan untuk meningkatkan aksesibilitas SAD terhadap pangan belum diketahui karena belum ditemukan penelitian yang fokusnya membahas masalah tersebut. Secara umum meskipun suatu wilayah merupakan wilayah yang tahan pangan yang ditunjukkan oleh ketersediaan pangan yang baik, namun tidak menjamin penduduk yang ada menjadi tahan pangan karena terlebih dahulu masih harus melihat aspek akses dan penyerapan pangannya.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari penelitian-penelitian sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan ketahanan pangan merupakan prioritas utama dalam pembangunan karena pangan merupakan kebutuhan yang paling dasar

bagi manusia sehingga pangan sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Kesimpulan dari beberapa hasil penelitian bahwa secara umum situasi ketahanan pangan masyarakat adat berada dalam kondisi pangan cukup rendah. Kebijakan untuk meningkatkan aksesibilitas SAD terhadap pangan belum diketahui karena belum ditemukan penelitian yang fokusnya membahas tentang masalah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, B., Kelman, I., Kamruzzaman, M., Mohiuddin, H., Mostafizur Rahman, M., Das, A., ... Shamsudduha, M. (2019). Indigenous people ' s responses to drought in northwest Bangladesh. *Environmental Development*, 29(November 2018), 55–66. <https://doi.org/10.1016/j.envdev.2018.11.004>
- Berman, M. (2018). Resource rents , universal basic income, and poverty among Alaska ' s Indigenous peoples. *World Development*, 106, 161–172. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.01.014>
- Bonis-profumo, G., McLaren, R., & Fanzo, J. (2019). Ravaged landscapes and climate vulnerability: The challenge in achieving food security and nutrition in post-conflict Timor-Leste. In *Advances in Food Security and Sustainability* (1st ed.). <https://doi.org/10.1016/bs.af2s.2019.06.005>
- Bose, P. (2019). Land Use Policy Oil palm plantations vs . shifting cultivation for indigenous peoples : Analyzing

- Mizoram ' s New Land Use Policy. *Land Use Policy*, 81(May 2018), 115–123.
<https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.10.022>
- Brusselaers, J., & Buysse, J. (2018). Forest Policy and Economics Implementation of the EU-Cameroon Voluntary Partnership Agreement policy: Trade distortion , rent-seeking and anticipative behavior. *Forest Policy and Economics*, 90(February), 167–179.
<https://doi.org/10.1016/j.forpol.2018.02.008>
- C. McClain, A., L. Dickin, K., & Dollahite, J. (2019). Life course influences on food provisioning among low-income, Mexican- born mothers with young children at risk of food insecurity. *Appetite*, 132, 8–17.
<https://doi.org/10.1016/j.appet.2018.09.014>
- Claeys, P., & Duncan, J. (2019). Food sovereignty and convergence spaces. *Political Geography*, 75(July), 102045.
<https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2019.102045>
- Cordoba, G. F. (2019). Does the recognition of indigenous territories impact household economic situations? Evidence from western Panama. *Journal of Comparative Economics*, 47(1), 225–237.
<https://doi.org/10.1016/j.jce.2018.11.002>
- Damman, S., Barth, W., & Kuhnlein, H. V. (2008). *Indigenous peoples ' nutrition transition in a right to food perspective*. 33, 135–155.
<https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2007.08.002>
- David, W., Nuringdati, N., & Ploeger, A. (2016). Water Usage Pattern on Different Group Residing In Vicinity Harapan Rainforest. *Italian Oral Surgery*, 9, 309–316.
<https://doi.org/10.1016/j.aaspro.2016.02.137>
- Doan-crider, B. D., Hipp, J. S., Fight, L. L., & Small, V. (2013). Keeping Native American Communities Connected to the Land: Women as Change Agents. *Rangelands*, 35(6), 63–67.
<https://doi.org/10.2111/RANGELANDS-D-13-00040.1>
- Doremus, J. (2019). Unintended impacts from forest certification: Evidence from indigenous Aka households in Congo. *Ecological Economics*, 166(June), 106378.
<https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2019.106378>
- Goodrich, C. G., Prakash, A., & Udas, P. B. (2019). Gendered vulnerability and adaptation in Hindu-Kush Himalayas : Research insights. *Environmental Development*, 31(November 2018), 1–8.
<https://doi.org/10.1016/j.envdev.2019.01.001>
- Graziano, M., Gunter, U., & Paziienza, P. (2019). Forest Policy and Economics Indigenous peoples ' land rights and agricultural expansion in Latin America : A dynamic panel data approach. *Forest Policy and Economics*, 109(August), 102001.
<https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.102001>
- Jackson, G., Mcnamara, K. E., & Witt, B. (2019). “ System of hunger ”: Understanding causal disaster vulnerability of indigenous food systems. *Journal of Rural Studies*, (September), 1–13.
<https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.10.042>
- Jordan, C. F. (2019). Energy Flow and

- Feedback Control in Ecological and Economic Food Systems Understanding Strengths in One System Helps Clarify a Weakness in the Other. *Ecological Economics*, 156(June 2018), 91–97. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2018.09.015>
- King, M. (2015). Food security top issue for Diabetes in Indigenous Peoples Stream. *Diabetes Research and Clinical Practice Journal*, 110, 4–5. <https://doi.org/10.1016/j.diabres.2015.11.009>
- Kumar, D., De, H. K., Kumar, S., Kumar, B., Dobhal, S., & Adhiguru, P. (2020). Forest Policy and Economics Indigenous people ' s attachment to shifting cultivation in the Eastern Himalayas , India : A cross-sectional evidence. *Forest Policy and Economics*, 111(April 2018), 102046. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.102046>
- Loring, P. A., & Whitely, C. (2018). Food Security and Food System Sustainability in North America. In *Encyclopedia of Food Security and Sustainability*. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-812687-5.21978-3>
- Lysenko, D., & Schott, S. (2019). Food Security and Wildlife Management in Nunavut. *Ecological Economics*, 156(March 2018), 360–374. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2018.10.008>
- Merino, R. (2018). Re-politicizing participation or reframing environmental governance? Beyond indigenous ' prior consultation and citizen participation. *World Development*, 111, 75–83. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.06.025>
- Ngoc, H., Thi, D., Chi, L., & Kingsbury, A. (2019). Indigenous knowledge and climate change adaptation of ethnic minorities in the mountainous regions of Vietnam : A case study of the Yao people in Bac Kan Province. *Agricultural Systems*, 176(July), 102683. <https://doi.org/10.1016/j.agsy.2019.102683>
- Nogueira, C. (2019). Contradictions in the concept of sustainable development : An analysis in social , economic , and political contexts. *Environmental Development*, 30(July 2018), 129–135. <https://doi.org/10.1016/j.envdev.2019.04.004>
- Otoara, M., Gonzalez, R., & Wairiu, M. (2019). Is there any chance for the poor to cope with extreme environmental events? Two case studies in the Solomon Islands. *World Development*, 122, 514–524. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.06.023>
- Pudyatmoko, S., Budiman, A., & Kristiansen, S. (2018). Towards sustainable coexistence : People and wild mammals in Baluran National Park , Indonesia. *Forest Policy and Economics*, 90(November 2017), 151–159. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2018.02.006>
- Schwartz, N., Tarasuk, V., Buliung, R., & Wilson, K. (2019). Social Science & Medicine Mobility impairments and geographic variation in vulnerability to household food insecurity. *Social Science & Medicine*, 243(June), 112636. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2019.112636>
- Shah, S., Moroca, A., & Bhat, J. A. (2018). Neo-traditional approaches for ensuring food security in Fiji Islands. *Environmental Development*,

- 28(November), 83–100.
<https://doi.org/10.1016/j.envdev.2018.11.001>
- Singh, C., Solomon, D., Bendapudi, R., Kuchimanchi, B., Iyer, S., & Bazaz, A. (2019). What shapes vulnerability and risk management in semi-arid India? Moving towards an agenda of sustainable adaptation. *Environmental Development*, 30(May 2018), 35–50.
<https://doi.org/10.1016/j.envdev.2019.04.007>
- Takiddin, T. (2014). Nilai-nilai Kearifan Budaya Lokal Orang Rimba (Studi pada Suku Minoritas Rimba di Kecamatan Air Hitam Provinsi Jambi). *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 1(2).
<https://doi.org/10.15408/sd.v1i2.1258>
- Teferi Moroda, G., Tolossa, D., & Semie, N. (2018). Perception and adaptation strategies of rural people against the adverse effects of climate variability A case study of Boset District, East Shewa, Ethiopia. *Environmental Development*, 27, 2–13.
<https://doi.org/10.1016/j.envdev.2018.07.005>
- Tikkanen, J. (2018). Participatory turn - and down-turn - in Finland ' s regional forest programme process. *Forest Policy and Economics*, 89(March 2016), 87–97.
<https://doi.org/10.1016/j.forpol.2017.04.009>
- Utter, J., Denny, S., Farrant, B., & Cribb, S. (2019). Feasibility of a Family Meal Intervention to Address Nutrition , Emotional Wellbeing , and Food Insecurity of Families With Adolescents. *Journal of Nutrition Education and Behavior*, 51(7), 885–892.
<https://doi.org/10.1016/j.jneb.2019.03.015>
- Wardani, E. M. (2011). Food for Indigenous Communities in Times of Global Crisis: Reflection from the Experiences of Orang Rimba Community (Jambi Province , Indonesia) and Ifugao Community (Ifugao Province , the Philippines). *Jurnal Kajian Wilayah*, 2(1), 19–34.
- Yamada, Y. (2018). Forest Policy and Economics Can a regional-level forest management policy achieve sustainable forest management? *Forest Policy and Economics*, 90(February), 82–89.
<https://doi.org/10.1016/j.forpol.2018.01.013>
- Zavaleta, C., Berrang-ford, L., Llanoscuentas, A., Cárcamo, C., Ford, J., Silvera, R., ... Harper, S. (2017). Indigenous Shawi communities and national food security support : Right direction , but not enough. *Food Policy*, 73(June), 75–87.
<https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2017.10.001>